

## PENGARUH DANA DESA TERHADAP KESEMPATAN KERJA DAN TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

Ni Kadek Bella Kurnia Agustini<sup>1</sup>

Made Kembar Sri Budhi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
email: [bellakurnia005@gmail.com](mailto:bellakurnia005@gmail.com)

### ABSTRAK

Pemerintah sejak tahun 2015 telah mengucurkan dana desa yang bersumber dari APBN dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan di desa termasuk mengentaskan kemiskinan, dana desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan di desa, sekolah, fasilitas kesehatan guna menurunkan tingkat kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan dan mensejahterakan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh dana desa terhadap kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali, (2) menganalisis pengaruh dana desa dan kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali, (3) menganalisis pengaruh tidak langsung dana desa terhadap tingkat kemiskinan melalui kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada tahun 2015-2018. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu *path analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja, (2) dana desa dan kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan (3) kesempatan kerja merupakan variabel *intervening* pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

**Kata Kunci:** *dana desa, kesempatan kerja, tingkat kemiskinan.*

### ABSTRACT

The government since 2015 has disbursed village funds sourced from the APBN in order to improve development performance in villages including poverty alleviation, village funds transferred through the district / city APBD, which will later be used for infrastructure development such as roads in villages, schools, health facilities for use. reduce the level of poverty, open up jobs and make the community prosperous. The objectives of this study were (1) to analyze the effect of village funds on job opportunities in the regencies / cities of Bali Province, (2) to analyze the effect of village funds and job opportunities on poverty levels in districts / cities of Bali Province, (3) to analyze the indirect effect of funds. villages against poverty levels through employment opportunities in the regencies / cities of Bali Province. The data used in this study are secondary data obtained from the Bali Provincial and Village Empowerment Service and the Bali Province Central Statistics Agency in 2015-2018. The data analysis technique used in this study is *path analysis*. The results of this study indicate that (1) village funds have a positive and significant effect on job opportunities, (2) village funds and job opportunities have a negative and significant effect on poverty levels, and (3) job opportunities are an intervening variable, the effect of village funds on poverty levels in Regency / City of Bali Province.

**Keywords:** *village funds, job opportunities, poverty level.*

## **PENDAHULUAN**

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh sebuah negara termasuk Negara Indonesia dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan masyarakatnya (Marhaeni dkk, 2014). Pertumbuhan ekonomi mutlak harus ada, sehingga pendapatan masyarakat akan bertambah, dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. Agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan faktor apa yang perlu dihindari agar pertumbuhan ekonomi tidak berjalan ditempat atau mengalami kemunduran. Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu seperti; modal (investasi dan pengeluaran pemerintah), tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 2004 :45)

Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan yang lebih besar kepada negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Tetapi sejauh mana kebutuhan ini dipenuhi tergantung pada kemampuan negara atau pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi di antara masyarakat dan distribusi pendapatan serta kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan sarana utama untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan manusia yang secara empirik terbukti merupakan syarat perlu bagi pembangunan manusia. Dalam hal ini ketenagakerjaan merupakan jembatan utama yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapabilitas manusia.

Dengan perkataan lain, yang diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam arti berpihak kepada tenaga kerja. (Suparta, 2014).

Kesejahteraan merupakan hal yang ingin dicapai semua orang, walaupun untuk mencapainya seseorang harus bekerja keras. Pemerintah baik pusat maupun daerah pasti memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya seperti yang tertera dalam UUD 1945. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu melalui pembangunan (Putra dan Sri Budhi, 2015). Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh sebuah negara termasuk Negara Indonesia dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan masyarakatnya (Marhaeni, 2014).

Dalam proses pembangunan selalu diupayakan pertumbuhan ekonomi adalah setinggi mungkin (Dayuh, 2012). Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatannya (Artana Yasa dan Arka, 2015). Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert dan Hahnel dalam Tiffany dan Yebo, 2016). Berdasarkan pada beberapa pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan (Ye Tian, 2012). Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini Suyatno (2005:15) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup

masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah. Pada kenyataannya dilapangan tidak pernah tercapai pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebabkan beberapa hal antara lain masalah-masalah internal seperti adanya kesenjangan antar manusia, kesenjangan antar daerah dan kesenjangan ekonomi, sedangkan masalah eksternal misalnya persaingan antar wilayah, baik antar wilayah regional maupun nasional (Von Luebke, 2009). Berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi akibat adanya pendapatan yang meningkat (Baldwin, 1986 dalam Lewis, 2006).

Dalam teori ekonomi mikro ada yang dikenal dengan teori Pareto yang menjelaskan tentang tiga jenis tingkatan kesejahteraan, yaitu pertama pareto optimal. Dalam tingkatan pareto optimal terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain.

Kedua pareto non-optimal, dalam kondisi pareto non-optimal terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. Ketiga, pareto superior. Dalam kondisi pareto superior terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori pareto tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah

mencapai pada kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan (Kristyanto *et al.*, 2018).

Pembangunan itu bersifat dinamis dan multidimensional, pembangunan dilakukan untuk mencapai sasaran utama yaitu kesejahteraan masyarakat di suatu Negara atau daerah. Menurut Indradewi dan Marhaeni (2016) salah satu cara meningkatkan pendapatan masyarakat agar dapat merasakan kehidupan yang layak adalah melalui pembangunan ekonomi yang merata di setiap wilayah. Pembangunan dapat berupa sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung semua sektor yang ada dan pengentasan masalah kemiskinan guna meningkatkan pendapatan penduduk miskin. Persoalan utama yang dapat menghambat pembangunan salah satunya yaitu kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang bersifat negatif dan berdampak buruk bagi kemajuan suatu daerah, jadi masalah kemiskinan ini harus dapat diberantas sampai ke akar-akarnya (Wirawan, 2015). Masih adanya penduduk miskin di beberapa wilayah artinya strategi pemerintah untuk menaikkan taraf hidup masyarakatnya belum benar-benar efektif dilaksanakan.

Pada umumnya di dalam rumah tangga miskin penghasilan per hari sangat diprioritaskan karena konsumsinya hari ini sangat bergantung pada penghasilannya hari ini juga. Rumah tangga miskin dalam mempertahankan kehidupannya selalu memikirkan sisi pengeluaran dan sisi pendapatannya, dimana rumah tangga miskin selai berupaya meminimalkan pengeluarannya dan memaksimalkan pendapatannya. Upaya itu dilakukan semata - mata untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak

bagi rumah tangga miskin sangat sulit dicapai hanya dengan upaya - upaya seperti itu. Pendapatan yang sedikit yang hanya dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari hari, membuat orang - orang yang berada dibawah kemiskinan harus bekerja keras setiap harinya. Peran pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk membantu rumah tangga miskin agar dapat hidup dengan layak (Haryanto, 2008).

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pemerataan distribusi pendapatan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah karena Baldwin 1986 (dalam Daniel *et al.*, 2010) mengemukakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah pun akan mengalami penurunan. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Ketidakmerataan yang menyebabkan ketimpangan ini merupakan masalah yang harus dicarikan penyelesaiannya (Syeda dan Khalid, 2015).

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu target kebijakan pembangunan di setiap negara agar kesenjangan pendapatan menjadi semakin kecil.

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena untuk menanggulangi kemiskinan tersebut masalah yang dihadapi tidak terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi juga melibatkan preferensi, nilai dan politik (Margareni, 2016). Pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan yang fundamental dan menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan berbagai jenis program pembangunan.

Kemiskinan memang merupakan masalah yang kompleks yang dapat menyerang daerah manapun, tidak terkecuali pulau Bali. Bali daerah yang dikenal dengan sebutan pulau seribu pura atau pulau dewata yang menjadi daerah tujuan wisata dunia, banyak yang mengira masyarakat di Bali pasti jauh dari kata kemiskinan. Kenyataannya Bali juga tidak lepas dari masalah kemiskinan.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2018**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (%)			
	2015	2016	2017	2018
Jembrana	5.84	5.33	5.38	5.20
Tabanan	5.52	5.00	4.92	4.46
Badung	2.33	2.06	2.06	1.98
Gianyar	4.61	4.44	4.46	4.19
Klungkung	6.91	6.35	6.29	5.86
Bangli	5.73	5.22	5.23	4.89
Karangasem	7.44	6.61	6.55	6.28
Buleleng	6.74	5.79	5.74	5.36
Denpasar	2.39	2.15	2.27	2.24
Provinsi Bali	4.74	4.25	4.25	4.01

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020*

Dilihat Tabel 1 presentase jumlah penduduk miskin di Kabupatem/Kota di Provinsi Bali mengalami fluktuasi, seperti pada Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Jembrana. Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi yaitu Kabupaten Karangasem sebesar 7,44 persen pada tahun 2015, berbanding jauh dengan Kabupaten Badung yang jumlah penduduk miskinnya sebesar 2,33 persen pada tahun 2015. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar memiliki jumlah penduduk miskin paling kecil, dibandingkan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, Buleleng, Tabanan, Jembrana, dan Gianyar. Dari tahun 2015-2016 presentase penduduk miskin di Bali mengalami penurunan hingga 0,22 persen hal ini terjadi karena penambahan jumlah penduduk miskin jauh lebih kecil dibandingkan penambahan jumlah penduduk selama periode tersebut dan ini juga disebabkan karena penurunan harga-harga kebutuhan pokok, selain itu kenaikan upah buruh tani juga menjadi alasan turunnya jumlah penduduk miskin sedangkan pada tahun 2017-2018 terdapat penurunan 0,24 persen.

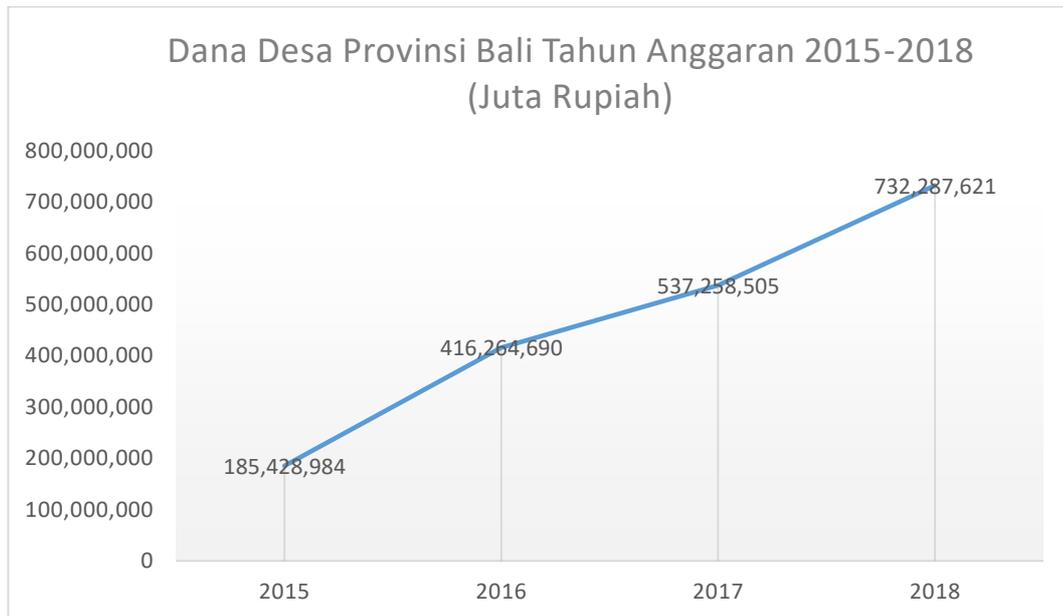
Tahun 2017 tercatat 4,14 persen dari jumlah total penduduk Bali tergolong sebagai penduduk miskin, sedangkan pada tahun 2018 tercatat mengalami penurunan ke angka 4,01 persen dari total penduduk Bali. Peran pemerintah berhasil dalam mengatasi kemiskinan karena Bali secara Nasional sebagai Provinsi dengan tingkat terendah ke dua di Indonesia. Tidak Lepas dari strategi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Target angka kemiskinan menurut Pemerintah Provinsi Bali dari 4,01 persen menjadi 1,5 persen. Tantangan yang harus dihadapi adalah lambatnya laju penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali, terutama di daerah perdesaan. Tingginya tingkat kemiskinan khususnya di

perdesaan menunjukkan kegiatan perekonomian yang stagnan, terutama di sektor pertanian. Untuk sekarang Provinsi Bali secara bertahap sudah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Strategi untuk mengurangi kemiskinan itu dilakukan dengan pelaksanaan program-program pro-rakyat dan memberikan fasilitas yang memadai agar mampu memenuhi dan mengakses berbagai pelayanan kebutuhan masyarakat seperti halnya dalam program JKBM, simantri, bedah rumah dan lain sebagainya. Provinsi Bali adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak berbagai sektor, akan tetapi pemerataan pembangunan masih belum terjadi di setiap di Bali, masih banyak ketimpangan pendapatan yang perlu diperbaiki (Astrini A dan Purbadharmaja, 2013)

Bali telah terkenal sebagai tujuan wisata sejak tahun 1920-an (Picard, 2003). Bali merupakan rumah bagi sebagian besar minoritas Hindu di Indonesia yang memiliki pantai yang indah, keanekaragaman hayati serta warisan seni dan budaya sehingga menciptakan peluang dalam sektor pariwisata (Tajeddini *et al*, 2017). Menurut Viken (2011) pariwisata adalah segala kegiatan wisata dan wisatawan. Gjorgievski *et. al.* (2013) mengemukakan peranan sektor pariwisata dalam perekonomian dapat dilihat dari pengeluaran wisatawan terhadap barang dan jasa di daerah tujuan wisata. Kontribusi sektor pariwisata berdampak besar terhadap pendapatan daerah (Vojnovic dan Knezevic, 2013). Kenyataannya daerah yang sering menjadi tujuan wisata turis-turis asing ataupun domestik, cenderung memiliki pendapatan yang tinggi ternyata tidak menutup kemungkinan masih terdapat masalah kemiskinan.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu pertama, ditujukan untuk orang-orang yang miskin seperti: bantuan beras untuk orang miskin, bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan dan PNPM mandiri. Kedua, ditujukan kepada seluruh masyarakat misalnya, pengurangan biaya sekolah (BOS) dan pendanaan pelayanan kesehatan (Sutikno dkk, 2010). Ada tiga strategi utama yang harus dilakukan dalam menanggulangi masalah kemiskinan yaitu bantuan sosial seperti memberikan akses bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan pelayanan baik itu pendidikan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan gizi, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin agar mampu meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik lagi dan yang terakhir adalah memberikan bantuan berupa kredit bagi usaha ekonomi mikro dan kecil (Putra dan Sri Budhi, 2015).

Banyaknya strategi yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan namun strategi itu belum mampu menekan angka kemiskinan (Dariwardani, 2014). Peran pemerintah daerah maupun pusat memang sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sejak tahun 2015, pemerintah memberikan Dana Desa kepada desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota. Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Berikut grafik anggaran alokasi dana desa di Provinsi Bali Tahun 2015-2018.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali, 2020.

**Gambar 1. Grafik Rincian Dana Desa Provinsi Bali Tahun Anggaran 2015-2018**

Hull (2009) menyatakan bahwa sarana prasarana merupakan kunci yang penting untuk mengatasi kemiskinan, karena dampak dari adanya infrastruktur dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses lapangan pekerjaan baru. Sebagai penggerak perekonomian, sarana prasarana mampu menciptakan kesempatan kerja kepada masyarakat. Misalkan dalam pengerjaan suatu proyek tentu membutuhkan berbagai sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia sebagai pengelola sumber daya alam yang membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, pembangunan sarana prasarana jalan berguna untuk memudahkan mobilitas barang/jasa, informasi, memperlancar perdagangan antara daerah, serta menaikkan harga (Tussa'diah, 2019).

**Tabel 2. Persentase Penggunaan Dana Desa 2015-2018 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2018**

Bidang Kegiatan	Persentase Penggunaan Dana Desa (%)			
	2015	2016	2017	2018
Pemenuhan Kebutuhan Dasar	88,24	5,81	8,04	15,17
Sarana Prasarana Desa	-	84,30	76,24	61,84
Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	-	2,83	5,22	2,92
Pemanfaatan SDA dan Lingkungan Berkelanjutan	-	0,44	2,76	2,01
Sarana Prasarana Lainnya	-	-	-	0,00
Pemberdayaan Masyarakat	3,82	6,18	7,56	17,99
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5,58	0,13	0,05	0,04
Pembinaan Kemasyarakatan	2,36	0,44	0,13	0,04
Jumlah	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali, 2020

Berdasarkan Tabel 2 realisasi penggunaan dana desa di Bali 2015 (88,24%) difokuskan untuk Pemenuhan dasar kebutuhan hidup karena dana desa baru saja mulai digulirkan. Sedangkan tahun berikutnya mulai di targetkan pada pembangunan sarana dan prasarana desa serta pemberdayaan masyarakat yaitu (84,30%) pada tahun 2016 dan (76,24) tahun 2017 pada 2018 pemanfaatan dana desa dominan untuk sarana prasarana desa (61,84%) penggunaan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar hanya sebesar 15,15% dari total realisasi penggunaan. Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku

lokal yang ada di desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Apabila alokasi dana desa diaktifkan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. (Sri Mulyani indrawati :2017).

Kenyataannya dengan adanya dana bantuan keuangan khusus kepada desa yang terus bertambah tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata di kabupaten/kota di Provinsi Bali dilihat pada Tabel 1.1 diketahui bahwa pemberian bantuan dana desa di Provinsi Bali meningkat setiap tahunnya, seharusnya pemberian bantuan khusus keuangan dapat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat selama ini (Wirawan, 2015).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014, formulasi perhitungan Alokasi Dana Desa adalah minimal 10 persen dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan menggunakan formulasi tersebut, jika menggunakan data dalam Perpres No, 162 Tahun 2014 tentang besaran jumlah transfer dana dari pusat ke daerah, maka terdapat potensi antara Rp 30-40 triliun dana yang mengalir ke desa dengan menggunakan mekanisme ADD. Alokasi Dana

Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program Desa. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program Desa. Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah dana desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan (Abidin, 2015).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli desa. Program dan kegiatannya meliputi bidang kegiatan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUM Desa danktau BUM Desa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa. Pembangunan sarana olahraga desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

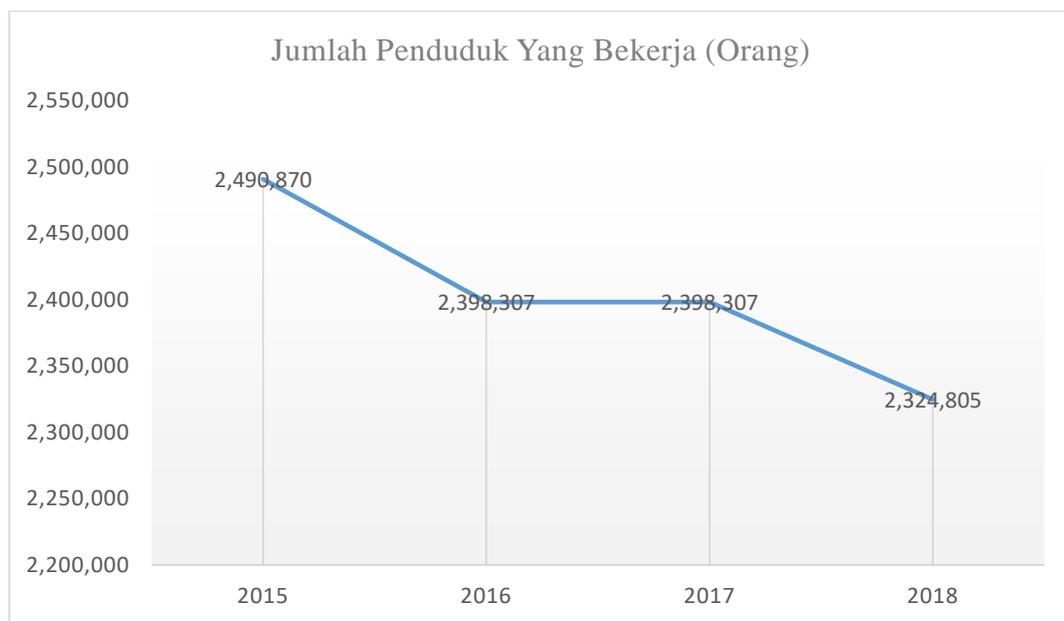
Penanggulangan kemiskinan di desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*). Kegiatan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di desa. Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan dana desa untuk bidang pembangunan desa

paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana desa (Bawono dan Setyadi, 2019:90).

Menurut Tangkumahat dkk (2017) dengan adanya Dana Desa, banyak kegiatan pembangunan dilaksanakan di desa. Peningkatan akselerasi kegiatan pembangunan membawa dampak positif utamanya pada penyerapan SDM berupa tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan pada proyek yang didanai bersumber dari Dana Desa, baik tenaga kerja dibayar maupun gotong royong dan pemberian modal usaha kepada masyarakat melalui BUMDesa. Semenjak digulirkannya Dana Desa mulai tahun 2015 sampai dengan 2016 tenaga kerja yang diperlukan meningkat disebabkan anggaran yang didapat oleh Pemerintah Desa sudah bertambah besar sehingga program kegiatan pembangunan fisik menjadi lebih banyak.

Gambar 2 menunjukkan bahwa kesempatan kerja di Provinsi Bali cenderung menurun seiring dengan adanya jumlah peningkatan dana desa dan pertumbuhan penduduk hal ini disebabkan karena terjadinya ketimpangan yang tajam antara masyarakat yang kondisi perekonomiannya lemah dan yang kondisi perekonomiannya stabil, begitu juga dengan tingkat pengangguran yang terjadi di Provinsi Bali, menurut data yang diperoleh kondisi tingkat pengangguran yang terjadi di Provinsi Bali juga mengalami fluktuasi disebabkan karena adanya imigran yang masuk ke Bali dengan tujuan ingin mencari pekerjaan, selain itu banyaknya perguruan tinggi baik swasta maupun negeri mencetak jumlah lulusan yang baik

yang tidak diikuti dengan peningkatan lowongan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Kedua hal ini merupakan faktor penyebab terjadinya fluktuasi pengangguran di Provinsi Bali (Wiradyatmika dan Sudiana, 2013).



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020

**Gambar 2. Jumlah Penduduk Yang Bekerja Di Provinsi Bali Tahun 2015-2018 (orang).**

Upaya yang dapat dilakukan guna mencapai tujuan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan membuka lapangan kerja. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 pada Pasal 1 ayat 23, Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan desa. Mengoptimalkan sumberdaya desa dapat meningkatkan perekonomian desa dan sekaligus membuka lapangan kerja untuk masyarakat desa serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu, dana desa ini mempunyai peran penting dalam pengentasan 3 kemiskinan untuk membentuk masyarakat yang mandiri, mapan, dan tidak bergantung lagi kepada pemerintah.

Melalui dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat maupun perekonomian. Potensi ekonomi saat ini sangat menjadi incaran suatu daerah untuk dapat membangun dan membangkitkan partisipatif masyarakat. Melalui dana desa ini maka setiap desa wajib melakukan pembangunan desa, terutama dalam bidang pengembangan potensi ekonomi lokal (Atmojo, dkk. 2017: 128).

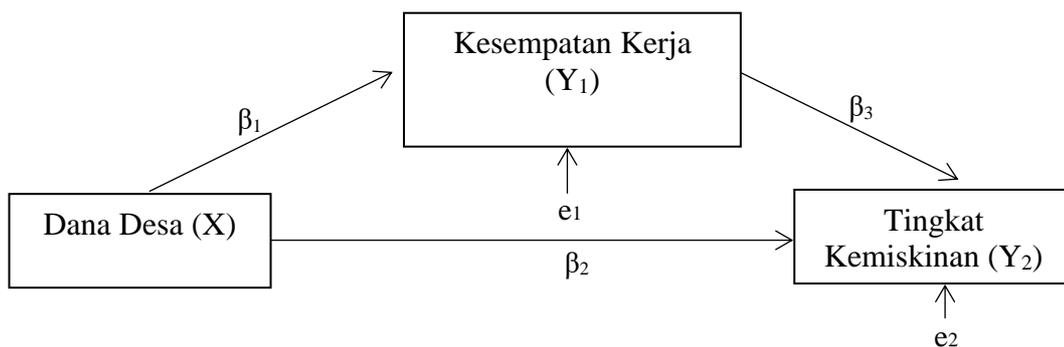
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh dana desa terhadap kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali, (2) menganalisis pengaruh dana desa dan kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali, (3) menganalisis pengaruh tidak langsung dana desa terhadap tingkat kemiskinan melalui kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Dimana dalam penelitian ini keterlibatan dana desa digunakan sebagai alat ukur untuk kesempatan kerja serta tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/kota Provinsi Bali. Lokasi ini dipilih karena dirasakannya masih perlu ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan melihat dari segi tingkat kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja agar seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Bali dapat merasakan kesejahteraan secara merata.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penggunaan dana desa pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali dan tingkat kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali. serta presentase tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan dana desa, presentase tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2015-2018. Data dana desa diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali sedangkan tingkat kemiskinan dan kesempatan kerja diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada tahun 2015-2018.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi nonpartisipan. Data dana desa diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali sedangkan kesempatan kerja dan tingkat kemiskinan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis jalur (*path analysis*). Diagram jalur dari penelitian ini dapat tampak pada Gambar 3.



**Gambar 3. Diagram Jalur Variabel Penelitian Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesempatan Kerja dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

$e_1$  menunjukkan jumlah variansi variabel kesempatan kerja ( $Y_1$ ) yang tidak dijelaskan oleh dana desa ( $x$ ).  $e_2$  variabel tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ) menunjukkan jumlah variansi tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ) yang tidak dijelaskan oleh dana desa ( $X$ ) dan tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ).

Berdasarkan Gambar 3. dapat dibuat persamaan struktural yang menunjukkan hubungan antar variabel yang dihipotesiskan sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_1 x + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_2 x + \beta_3 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- $X$  = Dana Desa
- $Y_1$  = Kesempatan Kerja
- $Y_2$  = Tingkat Kemiskinan
- $e_1, e_2$  = variabel pengganggu

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan-hubungan antar variabel penelitian yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Koefisien jalur dapat dibuat dalam bentuk diagram jalur (Suyana, 2016: 159). Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam persamaan struktural, yaitu:

Persamaan Struktural 1

$$Y_1 = 0,450 X_1 + e_1$$

Persamaan Struktural 2

$$Y_2 = -0,265 X_1 - 0,647 Y_1 + e_2$$

Nilai kekeliruan standar untuk variabel kesempatan kerja ( $Y_1$ ) yang tidak dijelaskan oleh dana desa ( $X$ ) yaitu:

$$e_1 = \sqrt{1 - R_1^2}$$

$$e_1 = \sqrt{1 - 0.976^2}$$

$$e_1 = 0.217$$

Nilai kekeliruan standar untuk tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ) menunjukkan jumlah varian tingkat kemiskinan yang tidak dijelaskan oleh dana desa ( $X$ ) dan kesempatan kerja ( $Y_1$ ) yaitu:

$$e_2 = \sqrt{1 - R_2^2}$$

$$e_2 = \sqrt{1 - 0.996^2}$$

$$e_2 = 0.063$$

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total hasilnya yaitu sebagai berikut.

$$\begin{aligned} R_m^2 &= 1 - e_1^2 \cdot e_2^2 \\ &= 1 - (0,217)^2 (0,063)^2 \\ &= 0.999 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 99,9 atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 99,9 persen yang dapat dijelaskan oleh model, dan sisanya sebesar 00,1 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

### **(1) Pengujian Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Perhitungan koefisien *path* dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 18.0 for Windows*, Pengujian persamaan satu dilakukan untuk melihat pengaruh dana desa terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali secara langsung, hasil uji regresi disajikan pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Hasil Uji *Path Analysis* (Struktur 1)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.266	2.086		3.004	.005
DanaDesa	.350	.119	.450	2.938	.006

a. Dependent Variable: KesempatanKerja

Sumber : *Data Penelitian, 2020*

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel dana desa (X) dengan nilai *standardized coefficients* sebesar 0,450 dan nilai sig.  $0,006 < 0,05$ , ini berarti bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah dana desa yang bertambah akan meningkatkan kesempatan kerja. Program dana desa memiliki dampak sangat besar terhadap pembangunan di desa. Untuk pertama kali, Indonesia mampu membangun sepanjang 121.709 kilometer (km), jembatan 1.960 km, air bersih sebanyak 32.711 unit, Polindes 6.041 unit, saluran irigasi 41.739 unit, drainase 590.371 unit, dan tambatan perahu 5.116 unit. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 21.811 unit, embung 2.047 unit, MCK 82.356 unit, pasar desa 5.220 unit, bangunan pendidikan anak usia dini (PAUD) 21.357 unit, posyandu 13.973 unit, sumur 45.865 unit, penahan tanah 291.393 unit, dan sarana olahraga 2.366 unit.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Sumarto dan Dwiantara (2019) yang menyatakan dengan adanya Dana Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan berkorelasi positif untuk membuat wajah pedesaan menjadi lebih baik. Warga di pedesaan pun diberdayakan dengan swakelola sehingga masyarakat desa lah yang mendapat manfaat dari dana desa

tersebut. Penyerapan tenaga kerja akan semakin terbuka sehingga masyarakat desa tidak perlu lagi mencari peluang kerja di kota. Dengan terbukanya kesempatan kerja di desa, terbuka juga harapan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sehingga tidak terbelenggu dalam rantai kemiskinan

## 2) Pengujian Pengaruh Dana Desa dan Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Pengujian persamaan satu dilakukan untuk melihat pengaruh dana desa dan kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali secara langsung, hasil uji regresi disajikan pada tabel 4. berikut.

**Tabel 4. Hasil Uji *Path Analysis* (Struktur 2)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19.544	7.589		2.575	.015
DanaDesa	-.690	.330	-.265	-2.094	.044
KesempatanKerja	-2.162	.423	-.647	-5.105	.000

Sumber : *Data Penelitian, 2020*

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel dana desa (X) dengan nilai *standardized coefficients* sebesar -0,265 dan nilai sig. 0,044 < 0,05 ini berarti bahwa dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Variabel kesempatan kerja (Y<sub>1</sub>) dengan nilai *standardized coefficients* sebesar -0,647 dan nilai sig. 0,000 < 0,05, ini berarti bahwa kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan serta pertumbuhan

wilayah-wilayah strategis harus ditingkatkan, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Peningkatan kualitas dan perluasan ruang lingkup dari pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi sumber daya manusia sumber daya manusia yang berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin (Lestari, 2017).

Hasil penelitian ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalpika Sunu dan Suyana Utama (2019) yang menyatakan dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini memiliki makna bahwa semakin tinggi tingkat kesempatan kerja, maka akan semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kesempatan kerja, maka akan semakin tinggi tingkat kemiskinan masyarakat suatu daerah.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak peluang kesempatan kerja yang tersedia bagi masyarakat, maka dapat mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Apabila kesempatan kerja luas dan semakin banyak menyerap tenaga kerja, maka masyarakat miskin akan semakin berkurang. Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan yang akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Penelitian ini mendukung beberapa hasil penelitian sebelumnya dan konsisten dengan hasil penelitian Yanthi (2011), Sunusi (2014) dan Vera, dkk. (2016) yang memperoleh hasil bahwa tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

**3) Peran Kesempatan Kerja Dalam Memediasi Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.**

$$S\beta_1\beta_3 = \sqrt{\beta_3^2 S b_1^2 + \beta_1^2 S \beta_3^2}$$

$$S\beta_1\beta_3 = \sqrt{(-2,162)^2 (0,119)^2 + (0,350)^2 (0,489)^2}$$

$$S\beta_1\beta_3 = 0,059$$

Keterangan:

- $S\beta_1\beta_3$  = besarnya *standard error* tidak langsung
- $S\beta_1$  = standar *error* koefisien  $b_1$
- $S\beta_2$  = standar *error* koefisien  $b_2$
- $S\beta_3$  = standar *error* koefisien  $b_3$
- $\beta_1$  = jalur X terhadap  $Y_1$
- $\beta_2$  = jalur X terhadap  $Y_2$
- $\beta_3$  = jalur  $Y_1$  terhadap  $Y_2$
- $\beta_1\beta_3$  = jalur X terhadap  $Y_1$  ( $\beta_1$ ) dengan jalur  $Y_1$  terhadap  $Y_2$  ( $\beta_3$ )

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nilai

z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{\beta_1\beta_3}{S\beta_1\beta_3}$$

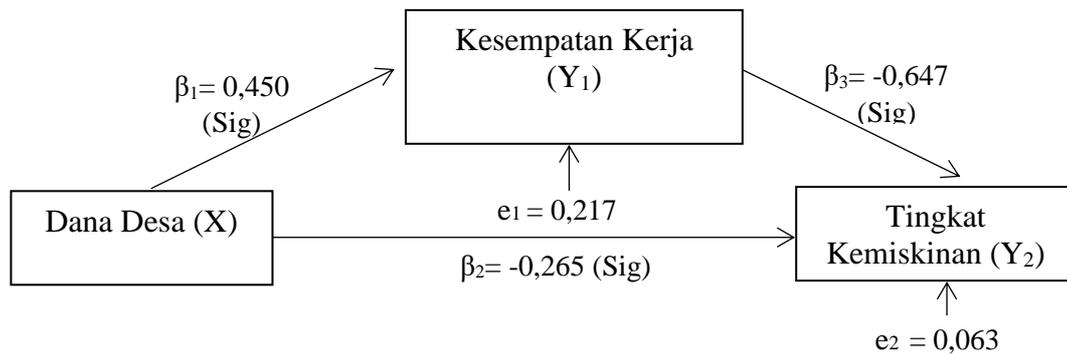
$$Z = \frac{(0,350) (-2,162)}{0,059}$$

$$Z = -12,825$$

**Tabel 5. Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total**

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui $Y_1$	
X → $Y_1$	0,450	-	0,450
X → $Y_2$	-0,265	-0,291	-0,556
$Y_1$ → $Y_2$	-0,647	-	-0,647

Hasil uji analisis jalur dapat dilihat dengan jelas pada diagram hasil analisis jalur. Nilai *standardized coefisien* digunakan untuk mendapatkan koefisien yang memiliki basis unit yang sama, sehingga dapat dibandingkan secara langsung antar variabel bebas, dalam pengaruhnya terhadap variabel terikat.



**Gambar 4. Model Diagram Jalur Akhir Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesempatan Kerja dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Hasil pengujian menunjukkan produksi memediasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Ini berarti meningkatnya jumlah dana desa mempengaruhi secara langsung terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Pemberian bantuan Dana Desa merupakan bentuk stimulasi untuk menaikkan investasi dalam upaya meningkatkan pembentukan modal. Sehingga semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu daerah, maka semakin banyak bantuan Dana Desa yang diberikan. Dana Desa diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan dapat mendanai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik. Kemudian proses pembentukan modal manusia ialah melalui pemberian input efektif nilai-nilai pendidikan, kesehatan dan moral kepada sumber daya manusia (Handayani, 2019). Hal ini didukung beberapa penelitian dari Gunatilaka (2001), Ahmad dan Tanzi (2002), Nanga (2006), Hong (2010) yang menyatakan desentralisasi mempunyai hubungan yang erat dalam pengentasan kemiskinan di suatu daerah. Secara spesifik penelitian ini juga didukung hasil kajian Prasetyanto (2012) yang menyatakan ADD mampu

meningkatkan kinerja fiskal dan perekonomian daerah, mampu mengurangi jumlah penduduk miskin.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka simpulan yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

- 1) Dana desa secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 2) Dana desa dan kesempatan kerja secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 3) Dana desa secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang telah dipaparkan, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

- 1) Pemerintah diharapkan terus melanjutkan program dana desa untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengentaskan kemiskinan dan mengupayakan agar masyarakat tidak kembali mengalami kemiskinan.
- 2) Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Bali lebih memperhatikan penggunaan dana desa dan memberikan sosialisasi serta meningkatkan pengawasan terhadap pengeluaran-pengeluaran dana desa yang dilakukan kepala desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penggunaannya tepat sasaran, dengan demikian manfaat dana desa

tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan tujuan dari program dana desa dalam menekan angka kemiskinan dapat tercapai.

## REFERENSI

- Antlöv, Hans., Wetterberg, Anna dan Dharmawan, Leni. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, Vol.52, No.2, ISSN:161-183.
- Artana Yasa, Komang Oka; Arka, Sudarsana. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antar daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.1.], nov. 2015. ISSN 2303-0186.
- Astrini A, Ni Made Myanti dan Purbadharmaja, Ida Bagus Putu. (2013). Pengaruh Pdrb, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 2 [8] :384-392
- Bakhtyar, Zaharim, Sopian and Moghimi. (2013). Housing For Poor People: A Review On Low Cost Housing Process In Malaysia. *Wseas Transactions On Environment and Development, University Kebangsaan Malaysia*, Vol. 9, Issue 2, ISSN:2224-3496.
- Ceu Thang and Baharuddin. (2011). Poverty Reduction: A Continuous Social Responsibility In Malaysia. *International Journal Of Rural Studies*, Vol. 18, No. 2, ISSN:1023-2001.
- Daniel W. Sacks, Betsey Stevenson, Justin Wolfers. (2010). Subjective Well-Being, Income, Economic Development and Growth. *International Journal Development*. 4(1): pp. 1–52
- Dariwardani, Ni Made Inna. (2014). Analisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) Di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008 – 2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.1.], may 2014. ISSN 2303 – 0186.
- Dayuh Rimbawan, Nyoman. (2012). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja Di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*, 6(2): 1918 – 1923.
- Devas, Nick. (1989). *Financial Local Government In Indonesia*. Ohio University Center for International Studies.
- Gjorgievski, Mijalce., Gramatnikovski, Sasko.,and Nakovski, Dejan. (2013). Geographic Positioning as a Determination of Tourism Development of Gevgelija Region. *UTMS Journal of Economics*, Vol.4, No.1, Hal: 61-69.

- Haryanto. (2008). Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9, No. 2, Desember 2008, hal.216 – 227.
- Islam, Rizwanul. (2014). The Nexus of Economic Growth, Employment, and Poverty Reduction: An Empirical Analysis. *Discussion Paper*, No 14. Recovery and Reconstruction Departement, ILO Office.
- J.A.C. Vel and W.Bedner. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: the return to the nagari and the 2014 Village Law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47:3, 493-507.
- Kenis. (1979). Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Riview*. Vol LIV No.4.pp707.
- Khuzaironi. (2015). Pengaruh Kebijakan Apbd Dan Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang*.
- Kim, Hansung, Sooyen Huh, Sangmi Choi and Yushin Lee. (2018). Perceptions of Inequality And Attitudes Towards Redistribution In For East Asian Welfare State. *International Journal Of Social Welfare*, Vol. 27, Issue 1, Pages:28-39, ISSN:1369-6866.
- Kristyanto, Visi Saujaningati, Kaluge, David. (2018). Peningkatan Inklusivitas Ekonomi Melalui Pembiayaan Investasi Modal Manusia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 11(2): h: 170-18
- Lewis, D Blane. (2006). Local government Taxation: An analysis of administrative Cost efficiency *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 42(2): pp.213-233
- Margareni, Ni Putu Ayu Purnama., I Ketut Djayastra dan I.G.W Murjana Yasa. (2016). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida Vol. XII No. 1: 101-110*.
- Marhaeni, AAIN. (2014). Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida Vol. X No. 1 : 8 – 18*.
- Mendes, Philip. (2009). Retrenching Or Renovating The Australian Welfere State: The Paradox Of The Toward Government’s Neo-Liberalism. *International Journal Of Social Welfare*, Vol. 18, Issue 1, Pages:102-110, ISSN:1369-6866.
- Picard, Michel. (2003). Touristification and balkanization in a time of reformasi. *Indonesia and the Malay World*, Vol.31, No.89, Hal: 108-118.

- Pramitha, Murjana Yasa dan Marhaeni. (2015). Peranan Dana Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Melalui Program Bedah Rumah di Kabupaten Buleleng. *E-jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana*, 4.02, hal. 106-124, ISSN:2337-3067.
- Prasetyo, Ratna Aziz. (2016). Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika* Volume XI No.1 Maret 2016.
- Purnami dan Saskara. (2016). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Jumlah Penduduk Miskin. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Udayana*, Vol.5, No.11:118-1218, ISSN:2303-0178.
- Shaughnessy. (2014). An Essay on Poverty and child Neglect:New Interventions. Washington and Lee *Journal Of Civil Right and Social Justice*, Vol.21, Issue 1.
- Sri budhi, Made Kembar. (2013). Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Bali: Analisi FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.1.], feb. 2013. ISSN 2303-0186.
- Suhartini, Atik Mar'atis dan Yuta, Ropika. (2012). Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.1.], nov. 2015. ISSN 2303-0186.
- Suryadarma dan Sumarto. (2011). Survey of recent developments. *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, Vol.47, No.2, 2011:155-181.
- Sutikno, Eddy Setiadi, Agnes Tuti Rumiati dan Lantip Trisunarno. (2010). Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 11, Nomor 1, hal.135 – 147.
- Syeda Anam Hassan, Khalid Zaman, Shah Gul. (2015). The Relationship between Growth-Inequality-Poverty Triangle and Environmental Degradation: Unveiling the Reality. *Arab Economics and Business Journal*. 10(1): pp.57–71
- Tajeddini, Kayhan, Alf H. Walle & Mela Denisa. (2017). Enterprising Women, Tourism, and Development: The Case of Bali. *International Journal of Hospitality & Tourism Administration*. ISSN: 1525-6480.
- Tiffany Suwoto, Yebo Zhai. (2016). Income Inequality as a Determinant of Economic Growth: A Cross-Country Analysis. *International Journal Economics Research*. 8(1): pp. 1–24

- Viken, Arvid. (2011). Tourism, Research, And Governance On Svalbard: A Symbiotic Relationship. *The Polar Record*, Vol.47, No.4, Hal: 335-347.
- Vojnovic, Knezevic dan Rade Knezevic. (2013). Economic And Tourism Indicators As A Means Of Monitoring Sustainable Tourism: The Case Of Inland Istria. *UTMS Journal of Economics*, Vol. 4, No.2, Hal: 213–230.
- Von Luebke, Christian. (2009). The Political Economy of Local Governance: Findings From an Indonesian Field Study. *Bulletin of Indonesian Economics Studies*. 45(2): pp.201-230
- Ye Tian. (2012). The Effect of Income Inequality on Economic Growth in China. *Economics & Business Journal*. 4(1): pp. 151-157
- Yuki Sekine. (2008). The Rise Of Poverty In Japan: The Emergence Of The Working Poor. *Japan Labor Review, Kobe University*, Vol.5, No.4.
- Yusuf dan Sumner. (2015). Growth, Poverty, and Inequality Under Jokowi. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, Vol.51, No.3, ISSN:0007-4918.